

GLOBAL KOMUNIKA

Jurnal Ilmiah FISIP UPN "Veteran" Jakarta

INTERVENSI MILITER PERANCIS DALAM KONFLIK INTERNAL DI MALI TAHUN 2013

Imelda Masni Juniaty Sianipar

KEKUATAN IDENTITAS NASIONAL BANGSA INDONESIA ERA GLOBALISASI DALAM KAJIAN NILAI BUDAYA SEBAGAI KEARIFAN LOKAL

Aniek Irawatie

TREND BERHIJAB TERHADAP PERILAKU KONSUMEN (STUDI PADA BRAND SUCH!)

Fitria Ayuningtyas

KEGIATAN CHARITY PT INTI TAMA KARSA DALAM MENCIPTAKAN CITRA POSITIF PADA PERUSAHAAN OUTSOURCHING

Ilona Vicenovie Oisina Situmeang

PENGGUNAAN FORUM KOMUNITAS BERBASIS WEB (ONLINE) SEBAGAI MEDIUM KOMUNIKASI PEMASARAN DI INTERNET (STUDI TERHADAP SITUS WWW.KASKUS.CO.ID)

Windhi Tia Saputra

MENJUAL LEWAT POSTER FILM; PENDEKATAN SEMIOTIKA TERHADAP POSTER FILM DI INDONESIA SEBAGAI MEDIA PERIKLANAN

Ahmad Zakki Abdullah

HUMAN RELATIONS INTERNAL PUBLIC PADA KONTEKS GAYA KEPEMIMPINAN DALAM SEBUAH PERUSAHAAN

Satino

UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING UKM SEKTOR TEKSTIL MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Nurmasari Situmeang, Shanti Darmastuti, Asep Kamaluddin Nashir

PERAN PARTAI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Ujang Komarudin

GLOBALISASI DAN KEPEMIMPINAN DI INDONESIA "Sebuah Refleksi Nilai- Nilai Pancasila "

Surahmad & Iswahyuni



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

GLOBAL KOMUNIKA

Jurnal Ilmiah FISIP UPN "Veteran" Jakarta

PERSONALIA PENGELOLA JURNAL ILMIAH

PENANGGUNG JAWAB DEKAN FISIP

Dr. Fredy Buhama Lumban Tobing

PEMIMPIN REDAKSI

Dra. Nurmasari Situmeang, M.Si

SEKRETARIS

Asep Kamaluddin Nashir, S.Ag., M.Si

BENDAHARA

Ir. Iswahyuni Adil, M.M

PENYUNTING AHLI

Dr. Soemardi Dahlan
(Dikti)

DEWAN PENYUNTING

Shanti Darmastuti, S.IP., M.Si

SIRKULASI

Ana Kuswanti, M.Ikom

LAYOUT

Hendrik Okta A, S.kom

ALAMAT PENERBIT

Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu

Jakarta Selatan 12450

Telp. +62 21 7656971 Ext. 156

Email: globalkomunika_fisip_upnvj@yahoo.com

Pertama Terbit : Juni 2009

Frekwensi : 2 kali Satu tahun

KATA PENGANTAR

Dinamika permasalahan global menurut akademisi untuk merespon secara proaktif melalui karya ilmiah yang lebih komunikatif. Tuntutan ini merupakan sebuah keniscayaan sehingga akan menciptakan sinergi antara akademisi, masyarakat dan pemerintah.

Pada edisi kali ini jurnal Global Komunika volume V Nomor 1, September 2015 - Februari 2016 menyajikan beberapa analisis dari tenaga pengajar di bidang ilmu komunikasi dan hubungan internasional. Hasil analisis tersebut adalah Intervensi militer Perancis dalam konflik internal di Mali tahun 2013, Kekuatan identitas nasional bangsa Indonesia era globalisasi dalam kajian nilai budaya sebagai kearifan lokal, Trend berhijab terhadap perilaku konsumen (studi pada brand such!), kegiatan *charity* PT. Inti Tama Karsa dalam menciptakan citra positif pada perusahaan *outsourcing*, Penggunaan forum komunitas berbasis web (*online*) sebagai medium komunikasi pemasaran di internet (studi terhadap situs www.kaskus.co.id), menjual lewat poster film; pendekatan semiotika terhadap poster film di Indonesia sebagai media periklanan, *Human relations internal public* pada konteks gaya kepemimpinan dalam sebuah perusahaan, Upaya pemerintah daerah kabupaten Bogor dalam meningkatkan daya saing UKM sektor tekstil menghadapi Asean Economic Community, dan Peran partai politik dalam kebijakan pembangunan, serta globalisasi dan kepemimpinan di indonesia "sebuah refleksi nilai- nilai pancasila "

Kami berharap jurnal global komunika ini dapat menjadi ajang publikasi hasil penelitian, hasil analisis, maupun hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi dunia akademisi.

Akhir kata redaksi mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu dengan tulus dari proses pengumpulan bahan, pengeditan dan percetakan serta semua pihak yang berperan sehingga saat ini jurnal Global Komunika Volume V Nomor 1 bisa sampai di tangan pembaca. Tak lupa redaksi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kepada para pembaca kami menunggu dan berharap koreksi serta kritik yang membangun untuk perbaikan dan untuk menjadi lebih baik.

DAFTAR ISI

INTERVENSI MILITER PERANCIS DALAM KONFLIK INTERNAL DI MALI TAHUN 2013

Imelda Masni Juniaty Sianipar 1-8

KEKUATAN IDENTITAS NASIONAL BANGSA INDONESIA ERA GLOBALISASI DALAM KAJIAN NILAI BUDAYA SEBAGAI KEARIFAN LOKAL

Aniek Irawatie 9-17

TREND BERHIJAB TERHADAP PERILAKU KONSUMEN (STUDI PADA BRAND SUCH!)

Fitria Ayuningtyas 18-25

KEGIATAN CHARITY PT INTI TAMA KARSA DALAM MENCIPTAKAN CITRA POSITIF PADA PERUSAHAAN OUTSOURCHING

Ilona Vicenovie Oisina Situmeang 26-38

PENGUNAAN FORUM KOMUNITAS BERBASIS WEB (ONLINE) SEBAGAI MEDIUM KOMUNIKASI PEMASARAN DI INTERNET (STUDI TERHADAP SITUS WWW.KASKUS.CO.ID)

Windhi Tia Saputra 39-44

MENJUAL LEWAT POSTER FILM; PENDEKATAN SEMIOTIKA TERHADAP POSTER FILM DI INDONESIA SEBAGAI MEDIA PERIKLANAN

Ahmad Zakki Abdullah 45-50

HUMAN RELATIONS INTERNAL PUBLIC PADA KONTEKS GAYA KEPEMIMPINAN DALAM SEBUAH PERUSAHAAN

Satino 51-57

UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING UKM SEKTOR TEKSTIL MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Nurmasari Situmeang, Shanti Darmastuti & Asep Kamaluddin Nashir 58-66

PERAN PARTAI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Ujang Komarudin 67-76

GLOBALISASI DAN KEPEMIMPINAN DI INDONESIA “Sebuah Refleksi Nilai-Nilai Pancasila”

Surahmad & Iswahyuni 77-84

Imelda Masni Juniaty Sianipar
(Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia)
imelda.sianipar@uki.ac.id

Abstract

This article will examine French military intervention in internal conflict in Mali in 2013. The intervention surprised the international community because it came earlier than the time set by UN Security Council that is September 2013. This article argues there are at least four reasons that motivate France to be involved in internal conflict in Mali. First, France would like to protect her workers in Mali. Second, France would like to protect Mali's mineral resources. It has been known that Mali is rich of gold, diamond, uranium and others. French would like to explore those resources. Third, France would like to protect Mali's people from the threat of Islamic radical movements. Since the coup d'etat period, there are serious human rights violation in Mali, especially to children and women. Fourth, France tries to combat the expansion of the movements to other countries. The expansion of the movements could danger the stability of the region.

Key Words: France, Internal Conflict, Mali, Islamic Radical Movement

"France, in this operation, is not pursuing any interest ... other than safeguarding a friendly country, and does not have any goal other than fighting against terrorism."

--French President Francois Hollande on the French intervention in Mali

PENDAHULUAN

Pada 11 Januari 2013, Perancis melakukan intervensi militer di Mali. Fenomena ini menarik perhatian masyarakat internasional dan menuai kontroversi. Warta RIA Novosti memberitakan bahwa anggota Dewan Federasi Rusia, Mikhail Margelov di Moskwa mempertanyakan kebijakan Perancis dalam konflik internal di Mali tersebut. Menurut Margelov, operasi militer di Mali sebaiknya dipimpin oleh Uni Afrika karena hanya rakyat Afrika yang bisa menyelesaikan masalah di benua tersebut. Jika Uni Afrika mengalami kegagalan maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat segera memberikan bantuan (dalam <http://internasional.kompas.com/read/2013/01/13/02324851/Rusia-Pertanyakan-Intervensi.Perancis>). Kelompok Taliban Pakistan menolak intervensi Perancis tersebut. Dalam pesan video yang dibagikan kepada wartawan di barat laut Pakistan, Juru Bicara Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), Ehsanullah Ehsan mengutuk intervensi Perancis dan menyerukan kepada semua umat Islam agar bersatu memerangi Perancis yang telah menyerang mujahidin di Mali. Kelompok Taliban Pakistan menganggap intervensi militer Perancis di Mali sebagai "perang ideologi" antara muslim dan barat (Ibid)

Dukungan terhadap intervensi militer Perancis berasal dari negara-negara barat antara lain Amerika Serikat dan Jerman. Dua negara besar tersebut akan memberikan bantuan logistik untuk memperlancar operasi militer Perancis di Mali. Jerman terutama mendukung sepenuhnya operasi militer Perancis di Mali ini meskipun pemerintah Jerman tidak berencana mengirimkan pasukan ke Mali. Sikap Jerman ini berbeda dengan kasus Libya. Ketika militer internasional memulai operasi militer pada Maret 2011, Jerman menolak terlibat dalam misi itu. Menyikapi intervensi militer Perancis di Mali ini, pemerintah Jerman menyatakan bahwa Perancis telah bertindak secara konsekuen dan tepat untuk menghadang kelompok teror yang bergerak menuju ibukota Mali, Bamako. Menteri Pertahanan Jerman, Thomas de Maiziere dan Menteri Luar Negeri Jerman, Guido Westerwelle menyatakan bahwa Jerman mendukung penuh intervensi Perancis di Mali karena Jerman dan Perancis memiliki kepentingan bersama yaitu agar Mali tidak menjadi tempat persembunyian atau menjadi markas bagi terorisme (dalam <http://www.dw.de/posisi-jerman-dalam-konflik-mali/a-16522984>).

Kasus intervensi militer Perancis di Mali menjadi sebuah fenomena yang semakin menarik diteliti karena ternyata Perancis telah menerapkan

standar ganda terhadap kelompok radikal Islam yang berkembang di Afrika dan Timur Tengah. Ketika huruhara terjadi di Libya, Perancis membantu kelompok Islam radikal Libya untuk menjatuhkan pemerintah Libya yang sah yaitu Muammar Gaddafi sementara pada kasus Mali, Perancis justru menentang kelompok Islam radikal Mali. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan meneliti motivasi Perancis melaksanakan intervensi militer di Mali pada tahun 2013.

Pengertian Intervensi

Hedley Bull dalam bukunya yang berjudul *intervention in world politics* mendefinisikan intervensi sebagai campur tangan dengan cara paksa oleh pihak luar terhadap lingkup yuridis sebuah negara berdaulat (*forcible interference by an outside party or parties in the sphere of jurisdiction of a sovereign state*) (Hedley Bull, 1984, hal.1-7). Para pakar hubungan internasional menganggap bahwa intervensi merupakan sebuah alat atau instrumen yang digunakan oleh para aktor internasional untuk mencapai politik luar negeri.

Dalam perspektif realisme, intervensi dilaksanakan untuk mencapai kepentingan nasional yaitu mempertahankan diri dan menjaga perimbangan kekuatan. Hans. J. Morgenthau, salah satu tokoh realis terkemuka berargumen bahwa intervensi merupakan sebuah instrumen kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan politik negara (*intervention is an "ancient and well-established" instrument of foreign policy that serves the political interest of certain nations*) (Hans J. Morgenthau, *Foreign Affairs* 45, hal. 92). Dalam pandangan Morgenthau, semua manusia berupaya meningkatkan kekuatan mereka. sifat alami manusia sebagai pengejar kekuasaan tersebut menciptakan situasi dimana negarawan berjuang untuk mendapatkan kekuasaan atas negara lainnya. Morgenthau berpendapat bahwa politik merupakan sebuah perjuangan mendapatkan kekuasaan atas manusia lainnya. Upaya untuk memperoleh, memelihara dan memperlihatkan kekuasaan tersebut akan menentukan tindakan politik. Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2005, hal 55-57). Dalam Politik internasional, negara-negara selalu fokus pada kepentingan nasional seperti keamanan dan kekayaan. Untuk melindungi kepentingan tersebut, intervensi merupakan salah satu pilihan. Morgentahu menegaskan hal tersebut dengan pernyataan berikut: "intervene we must where our national interest requires it and where our power gives us a chance to succeed. The choice of

these occasions will be determined...by a careful calculation of the interests involved and the power available" (Hans J. Morgenthau, *Ibid*).

Sejalan dengan pemikiran Morgenthau, Rosenau berpendapat bahwa intervensi merupakan alat yang digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Intervensi merupakan alat yang berorientasi pada penghancuran dan kekuasaan karena setiap negara yang melakukan intervensi memiliki tujuan untuk mengubah perilaku politik domestik negara lain. Intervensi merupakan strategi kekerasan yang ditujukan pada struktur kekuasaan negara. Seperti halnya perang, intervensi merupakan kelanjutan politik dengan cara lain. Oleh sebab itu, intervensi (khususnya intervensi militer) akan mendapatkan perlawanan dari negara yang diintervensi (Rosenau, James N, *Journal of Conflict Resolution*, 1969, hal 149–171). Menurut kaum realis, agar intervensi mengalami kesuksesan maka negara pengintervensi harus memiliki sumber daya atau kekuatan dalam jumlah yang besar. Umumnya, intervensi dilakukan oleh negara kuat terhadap negara lemah.

Berbeda dengan pandangan realisme yang menganggap bahwa suatu negara menggunakan intervensi sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasionalnya sendiri, dalam pandangan liberalisme, intervensi merupakan alat atau instrumen yang digunakan untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Kaum liberal umumnya berpandangan positif tentang sifat manusia. Mereka memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah internasional. Kaum liberal mengakui bahwa individu selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap satu hal. Tetapi mereka juga percaya bahwa individu-individu memiliki banyak kepentingan dan dengan demikian dapat terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif, baik domestik maupun internasional, yang menghasilkan manfaat besar bagi setiap orang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Konflik dan perang memang tidak dapat dihindarkan. Namun ketika manusia memakai akal pikirannya -membuat kalkulasi untung rugi- mereka dapat mencapai kerjasama yang saling menguntungkan. Kaum liberal mengakui bahwa akal pikiran manusia dapat mengalahkan ketakutan manusia dan nafsu akan kekuasaan (Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Ibid*).

Kaum liberal sangat peduli dengan kebahagiaan dan kesenangan individu. Menurut

John Locke, negara ada atau diciptakan demi menjamin kebebasan warganegara yang kemudian mengizinkan mereka menghidupi kehidupannya dan menggapai kebahagiaannya tanpa campur tangan tak semestinya dari orang lain. Kaum liberal melihat negara sebagai entitas konstitusional yang membentuk dan menjalankan aturan hukum yang menghormati hak warga negara untuk hidup, bebas dan sejahtera. Negara konstitusional seperti yang ada dalam bayangan Locke akan saling menghargai satu sama lain sesuai dengan norma-norma saling percaya. Negara-negara yang saling mempercayai dan menghargai ini pada akhirnya dapat membentuk “perdamaian abadi” (Ibid). Inilah yang kemudian menjadi impian dan harapan dari Immanuel Kant.

Cita-cita untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia tersebut telah memicu kaum liberal mengizinkan dilakukannya intervensi ke dalam wilayah negara lain. Menurut Michael Walzer, intervensi militer dapat dibenarkan sebagai upaya terakhir dan bertujuan untuk melindungi masyarakat sipil dari pelanggaran hak asasi seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Michael Doyle dan Stefano Recchia, 2011, hal. 1434).

Akan tetapi, intervensi sebaiknya tidak dilakukan secara unilateral tetapi multilateral artinya intervensi harus mendapat dukungan dari lembaga Perserikatan Bangsa-bangsa. Kelompok liberal percaya bahwa tindakan multilateral dapat menghalangi negara-negara besar mengejar kepentingan mereka sendiri dan mencapai tujuan kemanusiaan melalui intervensi.

Konflik Internal di Mali

Konflik di Mali bermula dari sebuah kudeta militer yang terjadi pada hari Kamis, 22 Maret 2012. Kudeta dipimpin oleh Kapten Amadou Haya Sanogo. Sanogo dan sekelompok tentara menyerang istana Presiden di Bamako, Ibukota Mali dan menggulingkan Presiden Amadou Toumani Toure. Mereka melakukan kudeta karena mereka menganggap pemerintah Mali tidak serius dalam menangani pemberontakan suku Tuareg di bagian Utara Mali. Toure adalah seorang mantan prajurit yang memimpin penggulingan presiden seumur hidup Moussa Traore pada 1991. Toure terpilih sebagai presiden Mali melalui pemilihan umum 2007 dan dijadwalkan akan meletakkan jabatan pada April 2013. Toure telah memerintah selama dua periode (dalam <http://www.beritasatu.com/afrika/38374-kudeta-militer-di-mali-rebut-istana.html>). Setelah Toure dikudeta, Sanogo menunjuk

Dioncounda Traore untuk menjadi Presiden interim Mali. Selanjutnya Traore memilih Sheikh Modibo Diarra sebagai Perdana Menteri.

Bersamaan dengan kudeta tersebut, suku Tuareg melakukan penyerangan terhadap pasukan Mali di Utara. Pemberontakan suku Tuareg kali ini merupakan sebuah koalisi baru yang dikenal dengan National Movement for the Liberation of Azawad (MNLA). Koalisi ini terdiri dari empat komponen utama. Pertama, kekuatan yang terdiri dari pemberontak Tuareg yang berasal dari Mali dan Niger. Mereka memiliki persenjataan dalam jumlah besar yang berasal dari Libia. Mereka inilah yang mendukung rezim Qaddafi dan berada dibawah kepemimpinan Khamis Gaddafi. Kedua, mantan pemberontak yang dipimpin oleh Ag Bahanga. Mayoritas pejuang ini berasal dari suku Afougas, sebuah suku kecil namun cukup berpengaruh di Mali Utara. Ketiga, gerakan Ansar Dine yang merupakan gerakan Islam yang dipimpin oleh Iyad Ag Ghali. Gerakan ini memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam Azawad yang menerapkan hukum syariah Islam. Gerakan ini bergabung dengan gerakan Tuareg yang tidak memiliki orientasi keagamaan. Mereka bersatu karena memiliki musuh bersama yaitu pemerintah Mali. Keempat, kelompok Al Qaeda yang berada di wilayah Maghreb. Gerakan ini bernama Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM). Kelompok inilah yang telah menyandera dan membunuh para pekerja Perancis di Mali.

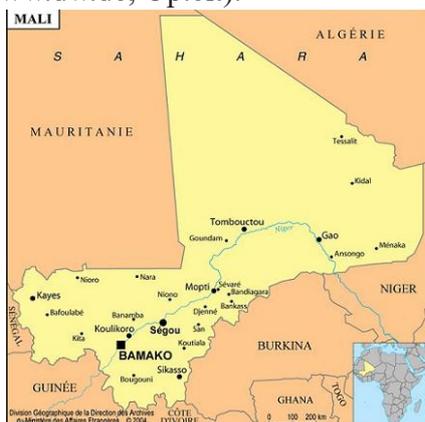
Pada 1 April 2012, suku Tuareg dan gerakan-gerakan lain yang tergabung dalam MNLA berhasil menguasai tiga kota utama Mali yaitu Timbuktu, Gao dan Kidal. Timbuktu merupakan benteng terakhir pemerintah di Mali utara. Timbuktu adalah kota besar terakhir yang jatuh ke tangan suku Tuareg dan gerilyawan muslim garis keras. Kota yang berpenduduk sekitar 50.000 orang itu adalah lokasi warisan dunia PBB dengan julukan “mutiara gurun”. MNLA menyatakan bahwa mereka akan mendirikan negara baru Azawad. Pendirian Azawad dideklarasikan pada 6 April 2012. Gao dijadikan sebagai ibukota Azawad (dalam <http://www.tempo.co/read/news/2012/04/09/119395604/Presiden-Mali-Resmi-Mengundurkan-Diri>).

Akan tetapi, pernyataan kemerdekaan Tuareg tersebut tidak diterima oleh masyarakat internasional. ECOWAS dengan segera menonaktifkan keanggotaan Mali sebagai anggota kerjasama regional. Penolakan terhadap kemerdekaan Tuareg tersebut paling tidak disebabkan oleh dua faktor.

Pertama, jumlah suku Tuareg tidak lebih dari 10% dari populasi dibandingkan suku-suku lain di Mali yaitu suku Songhai, Fulani dan Arab. Kedua, adanya tuduhan dari organisasi kemanusiaan yang menganggap pasukan pemberontak telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Mali Utara (termasuk pembunuhan besar-besaran tentara Mali, hukuman mati dan pemerkosaan (Abdullah Mamadou Bah, 2012).

Dalam perkembangan selanjutnya terjadi perpecahan diantara gerakan pemberontak. Gerakan Ansar Dine dan AQIM ingin menjadi pengontrol utama di wilayah utara. Mereka menerapkan syariat Islam di wilayah utara. Seluruh kebudayaan dan tradisi afro-sufi diharamkan. Makam-makam leluhur masyarakat asli dihancurkan. Seluruh perempuan diwajibkan memakai jilbab. Pencuri dihukum dengan cara memotong tangannya dan pelaku zina dirajam. Kelompok Jihadis juga memerintahkan pembakaran puluhan ribu naskah kuno. Rakyat Mali berupaya menyelundupkan sebagian naskah kuno itu di rumah-rumah mereka. Sehingga, ketika museum utama dibakar, sebagian naskah kuno dapat diselamatkan (dalam Raymond Samuel, Imperialisme mengincar Mali, <http://www.berdikarionline.com/dunia-bergerak/20130202/imperialisme-mengincar-mali.html>).

Pada Januari 2013, kelompok Islam radikal Mali yaitu Ansar Dine (Pembela Iman) dan MOJWA (The Movement for Unity and Jihad in West Africa/ Gerakan Tauhid dan Jihad di Afrika Barat) memasuki wilayah selatan Mali dan berhasil merebut kota strategis penting Konna dan Mopti. Konna merupakan pintu masuk ke wilayah selatan Mali, terletak kira-kira 600 km (375 mil) dari utara propinsi Mopti. Menurut diplomat PBB terdapat sekitar 1.200 gerilya Islamis di wilayah Konna. Untuk mengatasi kekacauan politik, Presiden interim Mali, Dioncounda Traore meminta Perancis untuk melakukan intervensi militer ke Mali (dalam <http://www.dw.de, Op.cit>).



<http://bridgesfrombamako.com/2013/01/16/behind-mali-conflict/>

Upaya Menjustifikasi Intervensi Militer ke Mali

Perancis mencoba melegitimasi intervensinya dengan menggunakan permintaan pemerintah Mali untuk melawan gerakan Islam radikal. Menurut Duta Besar Perancis di PBB, Gerard Araud, Presiden Interim Mali, Dioncounda Traore menulis surat kepada Presiden Perancis, Francois Hollande dan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon untuk memberikan bantuan militer dalam rangka menghadapi kaum pemberontak di Mali Utara (Ibid).

Permintaan pemerintah Mali tersebut selaras dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) yaitu resolusi 2085 (Lihat Resolusi 2085 DK. PBB). Resolusi ini dikeluarkan pada 20 Desember 2012. Melalui resolusi ini, DK PBB memberi ijin kepada kekuatan internasional untuk mendukung Mali dan menyelamatkan wilayah Utara Mali. Hal tersebut tertuang pada paragraf 13 dan 14 sebagai berikut:

Paragraf 13: Calls upon Member States, including from the Sahel region, to contribute troops to AFISMA in order to enable AFISMA to fulfil its mandate, welcomes the troop contributions already pledged by ECOWAS countries and further encourages Member States to cooperate closely with the African Union, ECOWAS, the United Nations, countries contributing troops and other donors to this end;

Paragraf 14 menyebutkan bahwa "Urges Member States, regional and international organizations to provide coordinated support to AFISMA, including military training, provision of equipment, intelligence, logistical support and any necessary assistance in efforts to reduce the threat posed by terrorist organizations, including AQIM, MUJWA and associated extremist groups in accordance with paragraph 9 (b), in close coordination with AFISMA and the Malian authorities

Dengan berpegang pada permintaan resmi pemerintah Mali dan Paragraf 13 dan 14 Resolusi 2085 DK PBB, Perancis mendapatkan legitimasi untuk mengirimkan pasukan ke Mali dalam rangka membantu pemerintah Mali mengusir kelompok pemberontak dari wilayah selatan Mali.

Intervensi militer Perancis juga dapat dibenarkan karena tim fakta PBB sendiri telah menemukan adanya pelanggaran hak asasi di Mali. Karenanya intervensi militer Perancis di Mali juga ditujukan untuk melindungi rakyat Mali dari ancaman teroris dan kelompok Islam Radikal. Hal

ini selaras dengan paragraf 18 resolusi 2085 yang menyatakan bahwa:

“... any support provided by the United Nations, regional and subregional organizations and Member States in the context of the military operation in Mali shall be consistent with international humanitarian and human rights law and refugee law, further requests the Secretary-General to ensure the relevant capacity within the United Nations presence as referred to in paragraph 23 below in order to observe adherence to international humanitarian and human rights law with regards to military operations in the north of Mali and include in his regular reports to the Security Council, as referred to in paragraph 24 below, the situation of civilians in the north of Mali and any violation of human rights law, international humanitarian law and refugee law in the north of Mali, as well as to advise on ways to mitigate any adverse impact of military operations on the civilian population, including on women and children;

Menurut Sekretaris Jenderal PBB untuk Hak Asasi Manusia, Ivan Simonovic, Mali telah menjadi tempat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang cukup berat. Pelanggaran HAM terutama dilakukan pada anak-anak dan perempuan. Para pemberontak Mali membeli tentara anak dari orang tua dengan memberikan biaya kompensasi sebesar USD600 per anak. Sedangkan pada para perempuan, pemberontak menikahi mereka dengan paksa dan memberikan uang sebesar USD1000 kepada orangtua para perempuan tersebut. Tak lama kemudian, para perempuan tersebut dijual kembali ke rumah border dan dipaksa menjadi pekerja seks (dalam <http://sports.sindonews.com/read/2012/10/11/44/678854/pelanggaran-ham-berat-oleh-pemberontak-mali>).

Misi mencari fakta tersebut juga mendapatkan informasi bahwa pemberontak Mali telah menerapkan hukuman yang sangat berat bagi pelaku kejahatan. Sejak konflik berlangsung, mereka mendapat laporan bahwa telah terjadi tiga hukuman mati di hadapan publik, delapan amputasi dan dua pencambukan. Ada pula dugaan penyiksaan dan kondisi penjara yang tidak manusiawi di Mali selatan, wilayah yang dikuasai pemerintah (dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/10/121010_childsoldiers.shtml).

Selain ingin melindungi rakyat dan pemerintah Mali, Perancis sendiri memiliki alasan yang tak kalah pentingnya di Mali. Perancis melaksanakan intervensi di perancis karena khawatir para

pemberontak akan mengancam keselamatan 6000 warga Pekerja berkebangsaan Perancis yang berada di Mali. Perancis telah mengalami persoalan serius berkaitan dengan keselamatan warganya di Mali dan Niger. Pada 16 September 2010, para pemberontak Mali telah menyandera 4 pekerja Perancis. Mereka diculik dari kawasan tambang uranium di Arlit, Niger. Tambang uranium di Arlit merupakan lokasi perusahaan raksasa nuklir Perancis, Areva beroperasi. Tindakan radikal dari kelompok ekstrimis Mali membuat Perancis harus segera melakukan intervensi sebelum para pemberontak menyandera para pekerja Perancis lainnya yang berada di Mali maupun di Niger yang merupakan negara tetangga Mali.

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan Mali tersebut dengan segera disetujui oleh Perancis. Terlebih lagi setelah gerakan kelompok pemberontak telah merebut kota Konna dan semakin mendesak pasukan pemerintah Mali ke wilayah selatan, ke arah ibukota Mali yaitu Bamako. Perancis khawatir Mali akan menjadi sarang baru teroris atau Afganistan baru di bawah Taliban. Karenanya pada 11 Januari 2013, Perancis mengirimkan 400 serdadu dan pesawat tempur ke Mali dalam rangka membantu Mali menyelesaikan konflik internal (dalam <http://www.dw.de>, Op.cit). Ini merupakan operasi militer tahap pertama yang bertujuan untuk mengusir militan dari bagian utara Mali. Operasi ini dikenal dengan operasi serval.

Dalam menjalankan misinya tersebut, sasaran pertama yang mendapatkan serangan-serangan udara pasukan penjajah Perancis adalah kota Konna. Jet-jet tempur menghancurkan beberapa kamp pejuang di Lere, sekitar 150 kilometer sebelah utara Konna. Kota ini merupakan kunci bagi Perancis untuk mengambil alih kembali sejumlah daerah yang dikuasai pemberontak. (dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/14/119454216/Prancis-Gempur-Sarang-Pemberontak-Mali>). Selanjutnya pada 21 Januari 2013, Pasukan Perancis dan Mali berhasil memasuki dua kota penting, Diabaly dan Doutenza. Kota Diabaly, terletak di 350 kilometer utara Ibu Kota Bamako dan merupakan pangkalan utama para pemberontak di selatan untuk menyerang garis depan Kota Mopti dan Sevare (dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/22/119456158/Pasukan-Prancis-dan-Mali-Masuk-ke-Diabaly>). Sevare memiliki bandar udara strategis yang dapat digunakan untuk menyiapkan logistik operasi penyerbuan ke utara. Kota ini terletak di sekitar 630 kilometer timur laut Bamako dan dekat dengan Konna (dalam <http://>

www.tempo.co/read/news/2013/01/21/119455879/Gempuran-Jet-Prancis-ke-Mali-Berlanjut)

Pada 26 Januari 2013, serdadu gabungan Prancis dan Mali menguasai Gao, kota kunci lainnya di Mali Utara. Pada 27 Januari 2013, mereka berhasil menguasai bandara Timbuktu. Penguasaan kembali bandara Timbuktu merupakan sebuah kemenangan besar bagi pasukan koalisi Prancis-Mali karena kota ini merupakan kota perdagangan tua dan pusat studi Islam. Di tempat ini terdapat 333 makam ulama Islam terkemuka (dalam <http://en.tempo.co/read/news/2013/01/28/119457396/Pasukan-Mali-dan-Prancis-Kuasai-Bandara-Timbuktu>). Pasukan Prancis dan Mali berhasil menguasai Gao dan Timbuktu tanpa perlawanan karena kelompok pemberontak telah lebih dahulu meninggalkan kota tersebut sebelum pasukan Prancis dan Mali tiba. Pada 30 Januari 2013, Pasukan Prancis dan Mali, berhasil menguasai Kota Kidal di Mali Utara. Di kota ini, Pasukan Prancis dan Mali juga tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Menurut wartawan BBC di Timbuktu, Thomas Fessy, pengambilalihan Kidal ini merupakan akhir dari operasi militer untuk mengusir militan dari bagian utara Mali.

Selanjutnya, Prancis akan mengirimkan kembali ribuan pasukan ke Afrika untuk mendukung operasi militer tahap kedua yaitu untuk menyingkirkan pejuang yang memiliki hubungan dengan Al Qaeda. Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius mengatakan bahwa setelah operasi Prancis di Mali tercapai yaitu menyingkirnya pemberontak yang ingin menguasai Mali maka Prancis akan meninggalkan Mali. Selanjutnya adalah tugas dari negara –negara Afrika untuk mengambil alih. Pada 17 Januari 2013, sebanyak 100 pasukan dari Togo, Nigeria dan Chad mendarat di ibu kota Bamako. Mereka bergabung dengan pasukan Prancis dan Mali untuk memerangi pasukan bersenjata kelompok Islam yang menguasai daerah utara Mali (dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/18/119455450/Militer-Mali-Kuasai-Kembali-Konna>).

Kekayaan Mineral Mali

Seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa Prancis mendapat dukungan penuh dari pemerintah Mali untuk melawan kaum gerilyawan Islamis. Bahkan, intervensi militer Prancis ini terjadi karena ada permintaan dari pemerintah Mali yang sah. Namun apakah intervensi Prancis di Mali semata-mata disebabkan oleh tanggungjawabnya untuk membantu Mali yang

sedang kesulitan atau memang Prancis punya tujuan lain di Mali. Karena seperti negara-negara di benua Eropa lainnya, Prancis sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mungkinkah, negara yang sedang “sekarat” bersedia mengorbankan waktu dan tenaga untuk mengurus negara kecil seperti Mali.

Peneliti berargumen bahwa salah satu motif Prancis bersedia memberikan bantuan militer kepada Mali karena Mali memiliki cadangan sumber daya mineral yang sangat melimpah. Mali memiliki emas, uranium, bauksit, besi, mangan, timah, tembaga dan lain-lain. Sebagian besar sumber daya mineral tersebut masih belum tergali hingga saat ini. Laporan terbaru dari the global research menyebutkan bahwa Mali bagian utara—yang sekarang ini menjadi zona perang—memiliki cadangan minyak yang sangat banyak. Karenanya, tujuan utama dari perang di Mali tidak lain adalah untuk mengamankan akses perusahaan internasional terhadap sumber daya alam Mali yang belum tergali tersebut (dalam <http://www.globalresearch.ca/the-war-on-mali-what-you-should-know/5319093>).

Mali merupakan negara pengekspor emas ketiga di kawasan Afrika dan pengekspor emas terbesar kedua di Afrika Barat. Pada tahun 2009, Mali mampu mengekspor 1.6 juta ons atau 49 ton. Total kekayaan emas Mali diperkirakan mencapai 350 ton. Selain emas, Mali juga kaya akan uranium. Saat ini, Mali sedang mengeksplorasi emas di 7 lokasi yaitu Kalana dan Morila di Mali Selatan, Yatela, Sadiola dan Loulo di Mali Barat dan Syama dan Tabakoto. Sementara itu, lokasi tambang emas yang sudah menghasilkan adalah Kofi, Kodieran, Goukoto, Komana, Banankoro, Kobada dan Nampalan (dalam <http://jmpmali.com/?pageid=51>).

Tambang uranium Mali terletak di Falea dan Gao. Uranium yang terdapat di kawasan pertambangan tersebut diperkirakan sebanyak 5000 ton. Mali memiliki tambang berlian di Kayes. Mali juga memiliki cadangan biji besi yang besar yaitu lebih dari 1,3 juta ton yang terdapat di Djidian-Kenieba, Diamou, dan Bale. Cadangan Bauksit Mali diperkirakan 1.2 juta ton. Mali masih memiliki cadangan mineral lainnya seperti batu kapur kira-kira 42.2 juta ton; tembaga 46 juta ton; timah dan seng sebanyak 1.7 juta ton; 4 juta cadangan litium; 53 juta ton batu garam; 65 juta ton diatomit; dan kira-kira 870 juta ton batu aspal (Ibid).

Industri tambang di Mali dikelola oleh tiga perusahaan besar yaitu AngloGold Ashanti,

Randgold, and IAMgold. Ketiga perusahaan ini dimiliki dan dibiayai oleh keluarga Rothschild. Keluarga Rotschild merupakan salah satu keluarga terkaya di dunia. Total asetnya mencapai US\$ 350 miliar. Keluarga ini mengendalikan bisnis perbankan dan real estate senilai US\$ 1 triliun (dalam <http://www.tempo.co/read/news/2012/10/17/121436129/>). Tambang sadiola dan Mprila merupakan tambang yang dikelola oleh Rothschild. Dua pertambangan ini menghasilkan 83 % dari semua emas yang dihasilkan oleh Mali pada 1999 hingga 2001. Perusahaan AngloGold Ashanti memiliki 20 lokasi tambang yang beroperasi di 10 negara di 4 benua. Pada tahun 2011, Perusahaan ini berhasil mengeksplorasi 4,33 juta ons emas yang senilai dengan \$ 6,6 milyar.

Berdasarkan fakta diatas nampak jelas bahwa intervensi militer Perancis yang didukung oleh negara-negara Barat seperti Amerika, Inggris dan Kanada memiliki tujuan ekonomi. Intervensi dilakukan untuk melindungi tambang-tambang mineral tersebut agar tidak jatuh ke tangan teroris.

Kesimpulan

Intervensi militer Perancis dalam konflik internal di Mali merupakan sebuah capaian penting yang dilakukan oleh Perancis pada tahun 2013. Kejadian ini membuktikan bahwa kekuatan militer Perancis masih dapat diandalkan terutama dalam rangka membantu negara-negara lemah seperti Mali yang mengalami kesulitan. Dalam melaksanakan operasi militernya tersebut, Perancis berupaya mengedepankan norma-norma liberal sebagai pembenaran atas tindakannya antara lain dengan menyatakan bahwa intervensi tersebut dilakukan untuk melindungi rakyat Mali yang terancam oleh kelompok radikal Islam dan menjaga stabilitas kawasan. Awalnya intervensi militer Perancis di Mali ini tidak mendapat persetujuan dari DK PBB karena menurut DK PBB, konflik di Mali sebaiknya ditangani oleh negara-negara Afrika. Namun setelah kelompok pemberontak terbukti semakin radikal, DK PBB pun mendukung intervensi tersebut.

Selain alasan kemanusiaan, intervensi militer Perancis di Mali juga didorong oleh kepentingan nasional Perancis. Perancis melaksanakan intervensi di Mali tidak hanya untuk melindungi rakyat Mali dari ancaman kelompok radikal Islam tetapi juga untuk melindungi keselamatan warganegaranya yang berada di Mali maupun di Niger. Para Pekerja Perancis yang berada di tambang uranium Areva, Niger seringkali mendapat ancaman dari kelompok Islam radikal. Bahkan pada 2010, kelompok

tersebut berhasil menyandera 4 pekerja Perancis.

Alasan lain yang tak kalah pentingnya adalah untuk melindungi sumber daya mineral Mali yang sangat banyak dan belum tergali seperti emas, berlian dan uranium. Perancis khawatir jika sumber daya mineral tersebut tidak dilindungi, mereka akan dikuasai oleh kelompok Islam radikal. Hal ini sangat berbahaya karena kelompok Islam radikal dapat memanfaatkan sumber daya tersebut untuk menghasilkan uang agar dapat mendanai gerakan-gerakan mereka. Saat ini, Mali merupakan negara penghasil emas ketiga di Afrika. Hal ini pulalah yang menyebabkan negara-negara Barat terutama Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Kanada mendukung intervensi Perancis di Mali.

Daftar Pustaka

- Bah, Abdullah Mamadou. 2012. "Prospects of the Security and Political Situation in North Mali", Al Jazeera Center for Studies, 1 Oktober.
- Bull, Hedley. 1984. *Intervention in World Politics*. Oxford: Clarendon Press.
- Doyle, Michael dan Doyle Recchia. 2011. "Liberalism in International Relations", *International Encyclopedia of Political Science*.
- Jackson, Robert dan Jackson Sorensen. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Morgenthau, Hans J., "To Intervene Or Not To Intervene", *Foreign Affairs* 45.
- Raymond Samuel, "Imperialisme mengincar Mali", <http://www.berdikarionline.com/dunia-bergerak/20130202/imperialisme-mengincar-mali.html>
- Dewan Keamanan PBB. 2012. Resolusi 2085
- Rosenau, James N. 1969. "Intervention as a Scientific Concept." *Journal of Conflict Resolution* 13(2).
<http://internasional.kompas.com/read/2013/01/13/02324851/Rusia-Pertanyakan-Intervensi.Perancis>).
- <http://www.dw.de/posisi-jerman-dalam-konflik-mali/a-16522984>
- <http://www.beritasatu.com/afrika/38374-kudeta-militer-di-mali-rebut-istana.html>
- <http://www.tempo.co/read/news/2012/04/09/119395604/Presiden-Mali-Resmi-Mengundurkan-Diri>).
- <http://sports.sindonews.com/read/2012/10/11/44/678854/pelanggaran-ham-berat-oleh-pemberontak-mali>
- http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/10/121010_childsoldiers.shtml).
- <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/14/119454216/Prancis-Gempur-Sarang-Pemberontak-Mali>
- <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/22/119456158/Pasukan-Prancis-dan-Mali-Masuk-ke-Diabaly>).
- <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/21/119455879/Gempuran-Jet-Prancis-ke-Mali-Berlanjut>).
- <http://en.tempo.co/read/news/2013/01/28/119457396/Pasukan-Mali-dan-Prancis-Kuasai-Bandara-Timbuktu>).
- <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/18/119455450/Militer-Mali-Kuasai-Kembali-Konna>).
- <http://www.globalresearch.ca/the-war-on-mali-what-you-should-know/5319093>).
- http://jmpmali.com/?page_id=51).
- <http://www.tempo.co/read/news/2012/10/17/121436129/>).